

**IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PEMERINTAH KELURAHAN DALAM MEWUJUDKAN
*GOOD GOVERNANCE***

(Studi di Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang)

SKRIPSI



OLEH:

ELBERT RODERICH NDAMUNG

2014210034

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG**

2022

RINGKASAN

Administrasi yang besar merupakan isu utama dalam penyelenggaraan manajemen kebijakan saat ini. Permintaan luar biasa daerah kepada otoritas publik untuk melakukan administrasi yang besar sesuai dengan perluasan informasi publik meskipun dampak globalisasi (Umar et al., 2018: 136). Dalam menjalankan kapasitasnya, perangkat kelurahan memiliki banyak usaha, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut: Merencanakan latihan Kelurahan dengan memperhatikan pengaturan peraturan dan sumber informasi yang dapat diakses sebagai aturan untuk melaksanakan latihan, Melakukan penilaian/survei untuk melacak menyusun susunan/strategi pilihan bagi atasan dan Merumuskan gagasan arahan khusus melalui penilaian sebagai bahan pengarah, pengendalian, pemeriksaan dan penilaian dalam penyelenggaraan pemerintahan, kerukunan dan permintaan masyarakat, penguatan wilayah setempat, dan dukungan yayasan dan dinas publik di Kelurahan tingkat. Tingkat kemajuan eksekusi, ilmuwan menggunakan hipotesis Gorge Edward III, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Juga, jenis pemeriksaan yang terlibat bersifat subjektif dengan sifat mencerahkan yang melibatkan triangulasi sumber sebagai penyelidikan informasi. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan tanggung jawab pemerintah kota dalam mengakui administrasi besar. Pemkab Tlogomas bertanggung jawab sepenuhnya atas program yang dilakukan. Untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pemerintah sub-daerah juga berkoordinasi dengan dinas keuangan dan sumber daya provinsi sebagai administrator, divisi otoritas publik dan departemen tinjauan interior. Sampai saat ini, kelompok masyarakat Tlogomas telah menjawab dengan baik atau menjunjung tinggi pelaksanaan tanggung jawab dan daerah setempat telah mengambil bagian

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi dan *Good Governance*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Administrasi yang besar merupakan isu utama dalam penyelenggaraan administrasi kebijakan saat ini. Tuntutan serius yang dilakukan oleh daerah kepada otoritas publik untuk melakukan administrasi yang besar sesuai dengan perluasan derajat informasi publik terlepas dari dampak globalisasi (Umar et al., 2018: 136). Rochman (2000) menyatakan bahwa administrasi adalah komponen untuk mengawasi aset moneter dan sosial yang mencakup dampak wilayah negara dan wilayah non-pemerintah dalam pengerahan agregat.

Besar pemerintahan provinsi, yang dapat menjadi acuan bagi tercapainya tujuan pemberian kemerdekaan, yaitu menggarap bantuan perangkat kewenangan publik di kabupaten dan meningkatkan bantuan pemerintah individu, menumbuhkan kehidupan berbasis popularitas, meningkatkan rasa etnis, kesetaraan, nilai, dan kebebasan lokal serta menjaga hubungan yang baik antara fokus dan wilayah. Unsur-unsur administrasi akhir-akhir ini menggarisbawahi sinergitas hubungan sektoral antara otoritas publik, daerah rahasia dan masyarakat umum sebagai bentuk kerjasama publik dalam administrasi dan pergantian peristiwa yang dapat dikelola (UNDP, 1997). Kondisi ini merupakan keputusan otoritas publik untuk menjalankan administrasinya secara voting based dan bertanggung jawab karena keyakinan ini merupakan isu yang paling nyata dan secara literal dilihat sebagai hipotesis lain dari implementasi kebijakan (Frederickson dan Smith, 2004).

Dalam distribusi yang didistribusikan oleh sekretariat Partnership for Governance, dinyatakan bahwa "administrasi besar adalah kesepakatan yang dicapai oleh pemerintah, penduduk dan daerah rahasia untuk organisasi bangsa atau negara". Artinya, administrasi besar adalah pemahaman tentang pedoman negara yang dibuat bersama oleh otoritas publik, masyarakat umum dan daerah rahasia. Oleh karena itu, untuk pengakuan administrasi yang baik, pertukaran diperlukan antara penghibur yang signifikan di negara bagian. Sehingga semua perkumpulan merasa memiliki rencana. Tanpa pemahaman yang dibawa ke dunia dari wacana

ini, kesuksesan tidak akan tercapai karena tujuan politik dan moneter individu terhambat.

UNDP mencirikan administrasi besar sebagai hubungan sinergis dan produktif antara ekspres, wilayah rahasia dan masyarakat (masyarakat). Lebih lanjut, Nisjar (1997) mengemukakan bahwa administrasi besar secara keseluruhan mengandung komponen-komponen utama yang terdiri dari tanggung jawab, keterusterangan, transparansi dan hukum dan ketertiban. Apalagi kesimpulan yang berbeda-beda seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2000. Yang dimaksud dengan Good Governance itu direncanakan, khususnya penyelenggaraan pemerintahan yang menciptakan dan menerapkan standar keterampilan, tanggung jawab, keterusterangan, bantuan yang luar biasa, suara berdasarkan sistem, kecakapan, kelangsungan hidup, hukum dan ketertiban dan memuaskan. oleh seluruh wilayah setempat (UNDP, 1997).

LAN dan BPKP (2000) merekomendasikan bahwa, makna Good Governance mengandung dua implikasi: Pertama, esteem yang memelihara keinginan/kehendak individu, dan nilai-nilai yang dapat membangun kapasitas individu untuk mencapai tujuan (publik) kebebasan, pergantian yang mendukung. peristiwa dan hak-hak sipil. Kedua, bagian utilitarian dari pemerintahan yang layak dan efektif dalam melakukan kewajibannya untuk mencapai tujuan tersebut.

Atribut umum atau standar administrasi yang baik umumnya saling mendukung dan saling terkait dan tidak dapat dibiarkan begitu saja. Selain itu, cenderung beralasan bahwa ada empat komponen atau aturan mendasar yang dapat memberikan garis besar implementasi kebijakan yang digambarkan oleh administrasi besar, khususnya sebagai berikut: Akuntabilitas, yaitu komitmen otoritas pemerintah untuk berjalan sebagai individu dalam mengendalikan dan bertanggung jawab atas semua kegiatan dan strategi yang mereka tetapkan. Keterbukaan, tepatnya administrasi besar akan langsung kepada kerabatnya, baik pada tingkat pusat dan peraturan lokal dan rasa keadilan wilayah lokal untuk setiap strategi terbuka yang diambil (Mardiasmo, 2006).

Sifat-sifat administrasi yang baik di atas menunjukkan aspek-aspek yang sangat potensial bila diterapkan dalam penyelesaian yang dibuat oleh suatu

perkumpulan apapun strukturnya. Dibutuhkan keyakinan atau kepercayaan bersertifikat dari HR yang merancang dan melakukan tugas utama dan elemen dari sebuah asosiasi tidak peduli apa strukturnya sesuai dengan sifat-sifat yang terkandung dalam atribut administrasi yang baik. Bagaimanapun, itu juga membutuhkan kemampuan keterampilan mengesankan yang diharapkan memenuhi syarat.

Ide administrasi yang baik di atas harus diubah menjadi presentasi asosiasi. Misalnya, dalam kemerdekaan provinsi, khususnya pelaksanaan desentralisasi kekuasaan oleh pemerintahan lingkungan negara bagian, kualitas atau sifat pemerintahan yang baik harus diubah menjadi cara paling umum untuk melaksanakan kemerdekaan daerah untuk mencapai prestasi besar (kritis). Kunci utama untuk melihat administrasi yang hebat adalah pemahaman tentang standar di dalamnya. Besar dan buruknya administrasi dapat dinilai dengan asumsi telah bersinggungan dengan seluruh komponen standar administrasi yang baik.

Eksekusi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan prasyarat yang merepotkan yang harus dipenuhi oleh setiap komponen penyelenggara negara. Administrasi khawatir tentang pemerintahan dewan menjalankan yang sadar dan sesuai dengan sistem aturan mayoritas dalam komponen pasar, dan terkait dengan upaya untuk mencegah pencemaran, nepotisme, dan kepuasan. Dengan demikian, secara wajar dapat mendorong kerangka peraturan yang lebih partisipatif dan menjamin rasa keadilan bagi kepentingan publik (Umar et al., 2018).

Kelurahan Tlogomas adalah sebuah kota yang terletak di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Kota ini terdiri dari 9 RW (Rukun Warga) dan 49 RT (Rukun Tetangga). Kantor kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru beralamat di Jalan Raya Tlogomas No 56. Desa Tlogomas dimotori oleh seorang Lurah yang dalam menyelesaikan kewajibannya Lurah dibantu oleh 10 orang pegawai. Pendampingan Desa Tlogomas berpartisipasi dalam berbagai bidang, termasuk sekolah, kesejahteraan umum, ekonomi, keamanan dan permintaan, pemerintah, organisasi wilayah setempat, hingga melibatkan bantuan pemerintah keluarga (Profil Desa Tlogomas, 2019).

Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) kelurahan Tlogomas, Kec. Lowokwaru tertuang dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Profil Kota Tlogomas). Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2016 Pasal 16 tentang Tugas dan Fungsi, Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengendalikan pemerintahan, kerukunan dan permintaan masyarakat, penguatan wilayah setempat, dan penyelenggaraan yayasan dan dinas publik di tingkat Kelurahan. . Dalam menjalankan fungsinya, perangkat kota memiliki banyak usaha, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Merencanakan latihan Kelurahan dengan mempertimbangkan pengaturan Peraturan Perundang-undangan dan sumber informasi yang dapat diakses sebagai aturan untuk melaksanakan latihan;
- b) Melakukan penilaian/survei untuk melacak pengaturan/pendekatan elektif untuk bos;
- c) Mengembangkan gagasan aturan khusus melalui evaluasi sebagai bahan arahan, pengendalian, pengamatan dan penilaian dalam penyelenggaraan pemerintahan, kerukunan dan permintaan masyarakat, penguatan wilayah setempat, dan dukungan yayasan dan kantor publik di tingkat Kelurahan;

Oleh karena itu, mengingat penggambaran di atas, pencipta sangat tertarik untuk mengarahkan penelitian dengan judul **“Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Kelurahan dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Di Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

- a) Bagaimanakah implementasi akuntabilitas pemerintah kelurahan dalam mewujudkan *Good Governance*?
- b) Bagaimanakah implementasi transparansi pemerintah kelurahan dalam mewujudkan *Good Governance*?

1.3 Tujuan Penulisan

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi akuntabilitas dan transparansi pemerintah kelurahan dalam mewujudkan *Good Governance*.

1.4 Manfaat

a) Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan peningkatan mutu pelayanan sebagai aparatur pemerintah.

b) Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan kepada pemerintah kelurahan khususnya dalam meningkatkan implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam mewujudkan *Good Governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Benveniste, G. 1991. Pengertian Akuntabilitas Menurut Pendapat Para Ahli.
<http://rimaru.web.id>
- Carino, L. V. 1993. *Organizational Behavior*. Eight Edition. Irwin/McGrawHill.
New York. United States of America.
- Chandler, Ralph C. And Plano, Jack C. 1988. *The Public Administration Dictionary*. Santa Barbara, California: ABC-Clio.
- Darwin, M. 1997. Pengembangan Aparatur Pemerintah Indonesia dalam Riza Noer Arfani. *Demokrasi Indonesia Kontemporer*. Rajawali Press, Jakarta.
- Djalil, R. 2014. Akuntabilitas Keuangan Daerah, Implementasi Pasca Reformasi. Edisi 1. Jakarta: Semester Rakyat Merdeka.
- Dunn, W. N. 2000. Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Edward C George. 1980. *Implementing Public Policy*. America. Congressional Quarterly press.
- Frederickson, H. George & Kevin B. Smith. 2003. *The Public Administration Theory Primer*. USA: Westview Press.
- Hetifa, S. 2003. Inovasi, Partisipasi dan *Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Imawan, R. 2003. Desentralisasi, demokratisasi, dan pembentukan good governance. *Jurnal utama daerah*, vil. Ii, no. 6, hal. –
- Islamy, I. M. 2003. Dasar-dasar Administrasi Publik dan Manajemen Publik. Malang: PDIA FIA-UB.
- Jabra and Dwivedi. 1998. *Public Sector Accountability*. Connecticut. Kluwer Press, Inc.
- Krina, P. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi, Sekretariat *Good Governance* Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Kristiansen, S., A. Dwiyanto., A. Pramusinto, dan E. A. Putranto. 2009. *Public Sector Reforms and Financial Transparency: Experiences from Indonesian District*. ISEAS: *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 31, No. 1 (April 2009), pp. 64-87
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta.
- LAN dan BPKP. 2000. Akuntabilitas dan *Good Governance*-Modul 1 Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Jakarta.
- Mahmudi. 2009. Reformasi Keuangan Negara dan Daerah Di Era Otonomi. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Public Melalui Akuntansi Sector Public: Suatu Saran *Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Volume 2, Nomor 1.
- Mardiasmo. 2009. Akuntabilitas Sector Publik, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Milies. B. M., M. Huberman and Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. First Edition. Englewood Cliffs, Prentice Hall. New York.
- Moleong, L. J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mustopadidjaja, A.R. 2003. Manajemen proses kebijakan public, formulasi, implementasi dan evaluasi kinerja, Jakarta: penerbit LAN
- Nisjar S. Karhi, 1997, Beberapa Catatan Tentang *Good Governance*, Jurnal Administrasi dan Pembangunan, Vol. 1, No. 2, hlm.
- Paul, H. and Blanchard, K. H. 1993. Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources. New Jersey: Prentice-Hal Inc.
- Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
- Profil Kelurahan Tlogomas. 2019. <http://keltlogomas.malangkota.go.id>
- Rakhmat. 2009. Teori Administrasi dan Manajemen Publik, Jakarta. Pustaka Arief.
- Rochman, M. G. 2000. *Good Governance*, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik). Penerbit Komnas HAM, Jakarta.
- Romzek dan Dubnick. 1995. *Accountability in the Public Sector*, Connecticut. Kemarin press.
- Rosyada, D. 2000. Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Sawir, M. 2017. Konsep Akuntabilitas Public. Papua Review, Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, Hal: 9-18
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance* (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju.
- Subarsono, AG.2011. Analisis kebijakan Publik: Konsep. Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2015. Memahami Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian. Penerbit, Alfa Beta. Bandung
- Tjokroamidjojo, B. 2000. *Good Governance* (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan), Jakarta: UI Press.
- Umar, S., C. F. Syawalina, dan Khairunnisa. 2018. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh. *Kolegial*, Vol.6, No. 2. Desember 2018. P-ISSN 2088-5644; E-ISSN 2614-008X.
- United Nations Development Program* (UNDP). 1997. *Governance for Sustainable Human Development*.